

Kepemimpinan Visioner dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Asih Widi Lestari^{1*}; Febianus Angga Saputra²; Firman Firdausi³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Tribhuwana Tungadewi, Indonesia

*Corresponding author: lestariwidi263@gmail.com

Abstract

Making a policy is determined by a leader who is in the institution and the leader has a leadership style, the leadership style that is owned will affect the final result of the policy to be issued. This study aims to find out how a leader applies the visionary leadership style in determining a policy and what are the factors that influence policy making in Sidomulyo Village Government, Batu District, Batu City by using qualitative methods. The application of data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques. The results of this study, a leader who applies a visionary leadership style in his area of authority will have the right future plans and have been arranged regularly through predetermined processes. The visionary leadership style that is applied keeps the village moving forward and developing in a good direction through well-organized development planning, community participation in events organized by the village and community empowerment in an effort to increase human resources. visionary leadership in sidomulyo village has been going well and in making policies the village head will always consider based on the needs of the community.

Keywords: Visionary Leadership; Policy Directions; Village Government

I. Pendahuluan

Kepemimpinan di dunia sangat berperan aktif dalam berbagai aspek untuk mengarahkan suatu organisasi, baik dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Keberhasilan suatu pengambilan keputusan dalam organisasi, baik swasta maupun pemerintahan tergantung pada bagaimana tipe kepemimpinan yang sedang digunakan oleh pemimpinnya, (Wijaya, 2015). Tipe kepemimpinan akan mencerminkan dan mengarahkan ke mana organisasi itu akan berkembang serta bagaimana organisasi itu akan bertahan terhadap perubahan perkembangan zaman yang begitu cepat. Seorang pemimpin umumnya tidak hanya memiliki satu tipe kepemimpinan saja, karena jika menggunakan lebih dari satu tipe kepemimpinan, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan organisasi tersebut berikut elemen-elemen yang berpengaruh di dalamnya.

Menurut Erie (2018) kepemimpinan visioner, seorang pemimpin harus mampu serta memiliki *skill* untuk berkomunikasi dengan baik dan pemimpin wajib memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya. Karena seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan visioner akan memikirkan perencanaan masa depan dan apa tahapan-tahapan yang harus diambil dalam mewujudkan perencanaan tersebut. Pada Pemerintahan Indonesia sendiri, kepemimpinan visioner sudah sering digunakan dalam sistem pemerintahan presidensial di mana calon presiden sudah memiliki visi yang ditawarkan saat pencalonan diri agar masyarakat memiliki minat untuk memilihnya. Visi ini yang akan menjadi acuan dalam masa jabatan Presiden serta

akan menjadi hal yang diprioritaskan baik dalam bentuk program pembangunan jangka pendek maupun panjang. Program-program prioritas yang menjadi andalan dalam mengatasi masalah sangat penting dan harus diselesaikan di negeri ini, sehingga bisa membantu masyarakat serta memajukan negara ke arah yang tepat.

Dalam pemerintahan daerah dari daerah provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa juga memiliki visi masing-masing tetapi dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya atau untuk kesejahteraan rakyat. Pengembangan visi dengan kesesuaian arah kebijakan yang diambil akan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan suatu daerah terutama di desa karena memiliki wilayah yang relatif mudah untuk dikelola berdasarkan potensi daerahnya. Kesesuaian visi dengan arah kebijakan yang diambil juga akan menjadi penentuan arah keputusan akhir suatu kebijakan. Pada era otonomi daerah di masa sekarang ini, gaya kepemimpinan visioner dapat memunculkan suatu kekuatan dan peluang yang dapat digunakan untuk menghasilkan pembangunan dan perbaikan ekonomi karena seorang pemimpin diberi hak untuk menentukan arah kebijakan dan perencanaan daerah yang dipimpin sesuai dengan kemauannya, sehingga memiliki otoritas atau hak untuk membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa sesuai dengan tingkat daerah yang dipimpin asal tidak boleh berlawanan atas kebijakan yang lebih tinggi kedudukannya. Peraturan ini digunakan untuk mengatur daerahnya, (Alifiyah, 2019).

Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan visioner pada suatu saat tertentu akan mengalami masalah-masalah dalam mengimplementasi seperti perubahan perencanaan karena suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, masalah ini akan menimbulkan perbedaan rencana awal oleh karena itu seorang pemimpin yang baik akan memiliki rencana lain dalam mensukseskan perencanaan yang telah dilakukan. Dalam penerapan kepemimpinan visioner akan sangat membutuhkan perhitungan yang matang dalam menentukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, perencanaan merupakan tantangan yang berat karena kepemimpinan visioner dituntut harus dapat memprediksi masa depan yang akan ditawarkan dalam rencananya. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan visioner dapat mensukseskan lembaga yang dipimpin, karena pemimpin merupakan ujung tombak dalam menentukan kemajuan dan menjadi orang yang dapat membuat kemajuan melalui kebijakannya. Maka dari itu kepemimpinan visioner ini dapat menjadi pembelajaran bagi seorang pemimpin yang ingin menerapkan gaya kepemimpinan untuk membuat mengembangkan lembaga atau daerah yang dipimpin jika menjadi pejabat eksekutif dan menjadi contoh dalam mengembangkan suatu wilayah yang dipimpin untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya.

Kebijakan dalam pengambilan keputusan adalah masalah fundamental, karena merupakan keputusan akhir yang menghasilkan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi dan akan mempengaruhi sistem dan hasil kerja. (Ilham, 2020) Secara garis lurus kebijakan akan memberikan dorongan dalam perkembangan dan menjadi dasar yang memuat perencanaan atas sebuah keputusan serta memiliki jangkauan hasil yang menitikberatkan pemuatan pada kebijakan tersebut. Arah kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin memiliki pengaruh sangat besar bagi suatu organisasi yang akan menjadi acuan dalam pekerjaan para bawahan (Edi, 2005). Di kepemimpinan visioner sendiri seorang pemimpin menjalankan kepemimpinan sesuai dengan visi yang dimiliki sebagai tujuan yang ingin dicapai selama menjadi pemimpin dan akan menjadi tolak ukur keberhasilan menjadi seorang pemimpin jika tujuan itu sudah dicapai maka ada perubahan ataupun peningkatan

tujuan ke arah yang lebih besar lagi, sehingga tujuannya tidak akan pernah berhenti, karena memiliki tujuan kedepannya yang lebih besar serta terarah.

Visi dalam kepemimpinan visioner wajib dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan visioner karena visi sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menentukan arah gerak organisasi dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Penentuan visi akan menjadi hal dasar dalam kepemimpinan visioner dan menjadi pegangan dalam mengatasi dan menghadapi suatu permasalahan, penentuan visi memiliki gambaran pencapaian masa depan. Dalam kepemimpinan visioner tidak menutup kemungkinan juga memiliki gaya kepemimpinan lainnya yang bisa digabungkan, seperti gaya kepemimpinan demokratis yang dapat membantu mencapai tujuan yaitu visi tersebut.

Pemerintahan Kota Batu memiliki visi yang dibuat oleh Wali Kota terpilih, yaitu menjadikan Kota Batu sebagai Kota Agrowisata Nasional. Visi tersebut telah berhasil dijalankan dan dikembangkan ke arah yang lebih baik, sehingga sekarang banyak wisatawan dari luar kota maupun luar provinsi yang berkunjung ke Kota Batu dengan tujuan untuk liburan, karena Kota Batu dikenal sebagai kota wisata. Sekarang ini Kota Batu lebih meningkatkan visinya lagi, yaitu ingin menjadi kota agrowisata berskala internasional agar wisatawan asing tertarik untuk berwisata ke Kota Batu, sehingga Kota Batu dikenal oleh mancanegara sebagai kota wisata serta memiliki nama baik yang dikenal di luar negeri. Hal ini secara tidak langsung dapat memajukan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya.

II. Landasan Teori

1. Kepemimpinan

Menurut Wijaya (2015) Kepemimpinan adalah tingkah laku individu atau seseorang yang dalam memimpin kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini karena perilaku pemimpin mencerminkan budaya dan tingkah laku organisasi, sehingga kepemimpinan menjadi hal yang dilihat pertama kali masuk ke dalam sebuah organisasi dalam konteks pemerintahan. Bagaimana seorang pemimpin memimpin bawahannya dengan ciri kepemimpinan yang dianut dan dia terapkan dalam organisasi, sehingga bisa memajukan dan mensejahterakan anggotanya atau bawahan dan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Menurut Suwanto (2015), Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan semangat. Kepemimpinan adalah kumpulan proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi melalui penerapan teknik-teknik manajemen yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah pengaruh sosial di mana pemimpin mencari partisipasi sukarela dari karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap nama besar suatu organisasi. Seorang pemimpin juga pasti memiliki filosofi yang menjadi pegangan dalam mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil.

Menurut Wijono (2018) mengatakan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah proses memotivasi orang lain agar mau bekerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang secara tidak langsung akan membuat orang tersebut menjadi seorang pemimpin sehingga orang lain dapat mengikuti kemauan yang diinginkan serta kata-kata yang diucapkan juga akan memotivasi bawahannya untuk bekerja dengan baik dan lebih giat lagi, sehingga tujuan dari organisasi akan tercapai secara perlahan dan menjadikan semua bawahannya memiliki dorongan untuk terus memajukan organisasi tersebut. Pemimpin merupakan sosok yang berwenang dan memiliki kedudukan tinggi dalam

sebuah organisasi. Arifin (2012) mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menerapkan berbagai jenis kepemimpinan sesuai dengan kondisi dan situasi serta memiliki segala macam karakter dan sifat sesuai dengan kepribadiannya, ada banyak jenis kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin dalam organisasi atau perusahaan.

2. Kepemimpinan Visioner

Pemimpin visioner adalah pemimpin dalam memimpin memiliki semangat serta selalu memiliki semangat untuk berorientasi pada masa depan, apa yang ingin diwujudkan di masa depan dari kenyataan yang dihadapinya saat ini. Bagi pemimpin visioner, ketika melihat batu misalnya, mereka memiliki keinginan untuk membangun rumah yang besar dan megah di benaknya. Pemimpin visioner penting dalam menentukan hidup matinya suatu organisasi (Marno, 2007). Karena itu seorang yang menerapkan gaya kepemimpinan visioner harus bisa membaca situasi dan kondisi saat perencanaan dan kondisi setelah itu agar bisa menyusun perencanaan secara baik. Danim dan Suparno (2012) berpendapat bahwa visi lebih dari sekedar ide atau gambaran masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi. Visi sejati adalah gagasan kuat yang mendorong dimulainya masa depan dengan mengandalkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan memiliki visi yang jelas serta menginspirasi bawahannya untuk bekerja dengan tekad yang kuat untuk mewujudkannya dan juga akan mendorong semangat bekerja, sehingga dapat meningkatkan hasil yang dicapai.

3. Kebijakan Pemerintah

Menurut Ilmar (2020) kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena pemerintah sebagai lembaga yang membuat suatu kebijakan berdasarkan kebutuhan ataupun hal diperlukan dan pembuatan yang dilakukan akan melibatkan masyarakat atau perwakilannya yang telah dipilih karena pembuatan suatu kebijakan menjadi solusi atas masalah yang sedang dihadapi dan menjadi kunci untuk menjadi lebih baik. Pembuatan suatu kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat dapat dipastikan karena adanya kepentingan, bukan berdasarkan kebutuhan. Pembuatan kebijakan tersebut akan menjadi masalah di dalam pemerintahan ini.

Edi Suharto (2005) menyatakan bahwa ada empat macam kelompok kebijakan, yaitu pertama berdasarkan pelaksanaann, kedua ruang lingkup dan cakupannya, ketiga berdasarkan keberlanjutan, dan keempat berdasarkan sasaran. Pertama berdasarkan pelaksanaann dapat dibedakan dua bagian yaitu model imperatif merupakan suatu kebijakan sebuah pemerintahan dan negara yang secara terpusat, yaitu semua tujuan sosial, sumber cakupannya, jenis, dan jumlah pelayanan sosial semuanya telah diatur serta ditentukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Berikutnya model indikatif (participatory) adalah kebijakan suatu pemerintahan dalam negara yang memperjuangkan sebuah visi dan sebuah aspirasi semua elemen masyarakat. Pemerintahan seringkali hanya menetapkan tujuannya yang luas, sedangkan dalam pelaksanaan dilakukan sepenuhnya dan seluruhnya oleh lembaga publik atau badan swasta. Kedua model kebijakan berdasarkan ruang lingkungnya dikenal sebagai model kebijakan yang universal dan model kebijakan yang selektif. Kebijakan model universal adalah kebijakan sebuah negara yang peruntukan dalam mengatur serta memenuhi kebutuhan pelayanan sosial bagi warga negara secara umum dan keseluruhan tanpa memandang umur, status sosial, dan jenis kelamin. Kebijakan model selektif merupakan kebijakan sebuah negara ditunjukkan agar dapat memenuhi kebutuhan secara sosial bagi

anggota masyarakat tertentu, seperti kelompok berpenghasilan yang memiliki kurang atau rendah.

Ketiga model kebijakan berdasarkan keberlanjutannya dapat dibagi menjadi kebijakan model residual dan model kebijakan kelemenbagaan. Model residual adalah sebuah kebijakan negara dikeluarkan dan diperlukan ketika situasi dalam keadaan tertentu (misalnya keluarga kehilangan pencari nafkah karena kematian) oleh karena itu tidak lagi dapat menjalankan perannya. Pelayanan ini diberikan secara sementara, akan dihentikan jika lembaga yang diperuntukan sudah aktif kembali seperti semula.. Model kelemenbagaan adalah bahwa kebijakan negara perlu tentukan tanpa mempertimbangkan berfungsi atau tidak lembaga, seperti bantuan kepada lembaga pendidikan serta perumahan bagi masyarakat. Keempat model berdasarkan tujuan dibagi menjadi model kebijakan berdasarkan kategorikal dan kebijakan model komprehensif. Kebijakan model kategoris adalah sebuah kebijakan yang diperuntukan dalam mengatasi suatu masalah dalam masyarakat berdasarkan jenis dan bidang masalah. Kebijakan model komprehensif adalah sebuah kebijakan yang diperuntukan untuk menangani beberapa jenis masyarakat secara terkait dan terpadu.

Menurut Setyawan (2017), tahap dalam kebijakan publik diperlukan agar proses yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis seperti yang direncanakan, tahapan sederhana dapat diartikan sebagai urutan atau rangkaian yang memiliki titik awal dan titik akhir. Pertama, agenda setting merupakan fase dan proses yang sangat strategis dalam mewujudkan kebijakan publik, (Anggara, 2018). Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Sebelumnya, masalah-masalah tersebut diperebutkan terlebih dahulu untuk bisa masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa isu masuk dalam agenda kebijakan para pembuat kebijakan. Kedua, perumusan kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan dan kemudian didiskusikan oleh pembuat kebijakan. Permasalahan-permasalahan tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Penyelesaian berbagai masalah bersumber dari berbagai pilihan dan alternatif kebijakan yang sudah ada. Mirip dengan pembuatan suatu masalah untuk masuk ke dalam suatu agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan setiap kebijakan yang dipilih bersaing untuk diambil salah satu kebijakan agar diperuntukan memecahkan masalah tersebut.

Ketiga adalah pengambilan kebijakan, yaitu dari masing-masing begitu banyak pilihan yang dapat dipilih yang di tawarkan oleh pembuat kebijakan, pada akhirnya diambil salah satu kebijakan yang terpilih dari banyak kebijakan dan yang terpilih akan didukung oleh mayoritas lembaga legislatif, serta akan diputuskan dan kebijakan tersebut akan diawasi oleh lembaga yudikatif. Yang keempat pelaksanaan kebijakannya yaitu dilakukan oleh lembaga-lembaga dan badan-badan yang ada didalam pemerintahan maupun instansi pemerintah dari tingkat paling bawah sampai paling atas. Kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh setiap unit administrasi yang memobilisasi keuangan dan sumber daya manusia di setiap daerah. Tahap pengimplementasi ini berbagai kepentingan dari setiap orang atau organisasi akan bersaing dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mendapatkan dukungan dari orang yang menerapkan kebijakan tersebut atau di sebut implementor. Lima evaluasi pengevaluasian kebijakan pada tahap ini kebijakan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi atau dinilai kelayakannya, untuk mengetahui bagaimana hasil dari kebijakan yang di buat pada saat di terapkan dilingkungan masyarakat dan sejauh mana dapat menyelesaikan permasalahan. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mengatasi, dan meminimalisir suatu permasalahan serta. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,

ditentukan dimensi suatu kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah mencapai dampak yang diinginkan.

Sedangkan dasar desa terutama kepala desa dalam menentukan tujuan atau visi desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kriteria Desa Mandiri Dapat dinilai dari tiga aspek yaitu pelayanan, penggunaan anggaran dan pembangunan. Kewenangan Desa juga diatur dalam Pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Serta pada Pasal 26 tentang Kepala Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas yang menjadi wewenang Kepala Desa adalah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif mengelola data atau hasil penelitian agar dapat dideskripsikan dengan baik serta untuk memaparkan gambaran dari hasil dokumentasi sebagaimana adanya (Sugiyono, 2019). Lokasi pada penelitian merupakan tempat akan dilangsungkan penelitian dan tempat peneliti dalam mengumpulkan data. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Fokus penelitian adalah tujuan utama penelitian ini dilakukan, fokus penelitian dapat ditentukan berdasarkan pengalaman pribadi atau melalui pengetahuan dari studi dari buku ataupun sumber lainnya (Moleong, 2014).

Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan visioner dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Untuk menentukansampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang ingin diteliti (Sugiyono, 2015). Instrumen utama peneliti sendiri. Keabsahan data digunakan model teknik triangulasi. Metode analisis data mengacu pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penentuan Visi Desa

Penetapan visi desa adalah suatu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa yang disepakati oleh masyarakat, penetapan visi dan misi desa diambil dari visi Kepala Desa saat masa pencalonan dan diselaraskan dengan visi Pemerintahan Kota. Dalam penentuan visi dan misi desa yang menjadi acuan adalah rencana kerja Kepala Desa terpilih karena beliau yang akan bawa kemana desa akan berkembang. Penetapan visi Desa Sidomulyo dilakukan setelah Bapak Suarto menjabat Kepala Desa, visi pada saat mencalonkan diri pada masa periode beliau yang kedua kalinya. Visi beliau adalah KERJA NYATA, RAPI, AMAN, HARMONIS, JUJUR, DAN OPTIMIS, dimana visi tersebut sudah diselaraskan dengan visi kota batu. Penetapan Visi Kepala Desa menjadi visi Desa Sidomulyo, juga memiliki proses yang sudah sesuai dengan prosedur, yaitu mulai dari rapat pertama penetapan visi desa yang diambil dari visi pada saat Kepala Desa mencalonkan dirinya, setelah itu ada rapat menyesuaikan visi desa. Penetapan visi desa yang selalu berkesinambungan dengan visi daerah juga memudahkan desa melakukan koordinasi prioritas pembangunan setiap tahun. Pembangunan yang menjadi visi desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terus

diupayakan percepatan pengerjaannya, serta pada rapat penetapan dan pengesahan visi desa yang dihadiri oleh semua lembaga yang ada di desa serta dimusyawarahkan secara bersama hasilnya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu selama enam tahun.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun tersebut, sesuai dengan visi dan misi desa serta Hasil akhir adalah penentuan program unggulan atau prioritas dalam membantu masyarakat. Dalam Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo akan sesuai dengan Undang-undang Tentang Peperencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi acuan desa dalam menentukan pembangunan dan melihat pembangunan yang diprioritaskan. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan membuat Desa Sidomulyo menjadi desa yang terus berinovasi dan lebih maju lagi. Perencanaan pembangunan yang dituangkan kedalam visi misi desa tersebut juga akan menjadi patokan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Desa Selama masa periode kepemimpinan Kepala Desa, perkembangan Desa Sidomulyo sebagai desa mandiri tidak luput dari beberapa aspek yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang Desa yang berlaku saat ini. Salah satu pembangunan yang berhasil dilakukan oleh desa adalah pembangunan Mall Bunga yang menjadi tempat khusus penjualan bunga di Desa Sidomulyo.

Hal ini juga sesuai dengan visi Kepala Desa yaitu kerja nyata dimana Pemerintahan Desa Sidomulyo membantu masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi melalui pembangunan jalan, dan fasilitas penunjangnya seperti Mall Bunga. Pembangunan mall bunga ini dilatar belakangi karena Desa Sidomulyo sebagai desa bunga alasan mengapa di sebut Desa Bunga karena mayoritas penduduknya sebagai petani bunga, oleh karena itu Pemerintahan Desa Memiliki suatu program pembangunan Mall Bunga dan juga sebagai Kepala Desa memiliki gaya kepemimpinan visioner pembangunan mall bunga ini juga memiliki pengaruh untuk memajukan desa dalam lebih memperkenalkan sektor proritas desa sebagai desa wisata dengan memiliki tanaman hiasa yang bernaneka ragam. Berikut adalah gambar Mall Bunga yang ada di Desa Sidomulyo:



Gambar 1. Mall Bunga

Sumber: Data Primer Desa tahun 2022

Program pembangunan Mall Bunga diharapkan dapat membantu mempermudah penjualan tanaman hias yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sidomulyo, selain itu pembangunan Mall Bunga juga bertujuan untuk memajukan pariwisata desa dengan

mempromosikan melalui media massa tentang apa saja tanaman hias khas Desa Sidomulyo. Selain promosi hal yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah pembinaan petani dengan program pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani bunga, dalam mengembangkan usaha untuk membantu masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh desa dalam mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi, masyarakat sidomulyo adalah pembangunan Mall Bunga yang, pembangunan dimaksudkan untuk membantu petani bunga memasarkan hasil pertaniannya dan sebagai daya tarik wisatawan agar mau berkunjung ke Desa Sidomulyo. Dapat dilihat bahwa penetapan visi desa di Desa Sidomulyo berdasarkan banyak aspek yang mempengaruhi penentunya, salah satunya aspek yang mempengaruhi keberhasilan desa adalah penerapan visi secara cermat yang akan menentukan keberhasilan desa dalam mensejahterakan rakyatnya, seperti prioritas pembangunan, dan perencanaan yang matang.

2. Penerapan Kepemimpinan Visioner

Penerapan kepemimpinan visioner juga merupakan cara seorang pemimpin untuk menggerakkan organisasi dan menentukan visi masa depan desa yang dipimpin, Bapak Kepala Desa memimpin Desa Sidomulyo dengan sangat baik, sehingga bisa membuat desa terus berkembang dan menjadi desa mandiri hal ini juga tidak luput dari visi dan misi beliau yang selalu dipegang teguh serta dijalankan tahap demi tahap agar Desa Sidomulyo menjadi desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera serta tidak melupakan budaya yang tetap dilestarikan.

Penerapan kepemimpinan visioner yang baik di Desa Sidomulyo dapat dilihat dari berapa indikator kepemimpinan visioner yaitu pertama memikirkan masa depan dengan menerapkan sistem perencanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia secara baik, transparan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua menciptakan budaya dan perilaku yang maju serta antisipatif caranya adalah melestarikan budaya kearifan lokal yang ada di desa melalui pelestarian bantengan dan bunga kas Desa Sidomulyo. Ketiga menumbuhkan inspirasi dan semangat hingga komitmen dalam bekerja, dengan memberikan pelatihan bagi staf dan perangkat desa dalam sistem pelayanan, serta melatih kekompakan dalam perangkat di desa. melalui libur yang dilakukan pada hari libur sehingga tidak mengganggu hari kerja. Kepala Desa juga merencanakan masa depan desa dengan mengedepankan kemajuan secara menyeluruh dalam segala aspek bukan hanya dalam satu hal saja, penentuan visi Kepala Desa juga tidak boleh beda dengan visi Kota atau Kabupaten yang menaungi desa. Visi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan yang lebih tinggi dari desa akan mengarahkan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh kota atau kabupaten karena sebagai Pemerintah Desa akan mengikuti arahan dari pemerintah kota atau kabupaten maupun pusat. Dalam menentukan visi desa, terlebih dahulu harus menyesuaikan dengan keadaan serta kondisi desa, lingkungan, iklim, dan juga memahami budaya yang menjadi hal sangat penting. Penentuan visi tidak boleh bertentangan dengan hal-hal tersebut, karena visi adalah gambaran kedepannya. Untuk mencapai visi desa, bapak Kepala Desa juga memajukan evaluasi kinerja perangkat dan stafnya secara rutin, evaluasi kinerja akan dilakukan tiga bulan sekali untuk meningkatkan kinerja perangkat dan staf dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta kekurangan yang harus diperbaiki dari setiap perangkat dan staf agar kinerja pada bulan selanjutnya lebih meningkat.

Dilihat perkembangan Desa Sidomulyo dari tahun ke tahun ini, karena penerapan kepemimpinan visioner yang sangat baik menghantarkan Desa Sidomulyo sebagai salah satu desa mandiri di Kota Batu. Perkembangan pembangunan di Desa Sidomulyo juga tergolong

ke dalam pembangunan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) peringkat keempat tahun 2022, meskipun mengalami penurunan peringkat dari tahun sebelumnya, tetapi Desa Sidomulyo tetap mempertahankan nilai pada tahun 2021. Berikut adalah pembangunan yang dilakukan untuk menunjang visi desa ke depan:



Gambar 2. Pembangunan Pasar Kuliner I

Sumber: Data Primer Desa Sidomulyo Tahun 2022



Gambar 3. Pembangunan Pasar Kuliner II

Sumber: Data Primer Desa Sidomulyo Tahun 2022

Pembangunan pasar kuliner dilakukan pada tahun 2022 serta akan dipergunakan untuk membantu memajukan dan merencanakan masa depan desa yang bukan hanya terkenal dengan bunga, tetapi juga dengan kulinernya. Pembangunan pasar kuliner yang terletak di tempat yang strategis, yaitu di depan lapangan Desa Sidomulyo yang sering dimanfaatkan sebagai tempat mengadakan acara serta tidak jauh pula dari Mall Bunga. Pasar kuliner ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Desa Sidomulyo, membeli bunga juga bisa mencicipi kuliner yang khas Desa Sidomulyo.

Pengembangan visi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peluang potensi desa yang ada, dan hadirnya seorang pemimpin dengan kepemimpinan visioner di suatu desa dapat menghasilkan perencanaan masa depan yang matang dengan harapan akan mengantarkan desa yang memiliki masa depan cerah. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa dan Perencanaan Jangka Pendek dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang keduanya disepakati dan ditetapkan oleh semua elemen masyarakat melalui Musyawarah Desa. Pengambilan

sebuah kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin akan menjadi dasar bagi bawahannya dalam melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Pembuatan sebuah kebijakan bertujuan untuk memajukan organisasi yang dipimpin dan juga menjadi acuan pengambilan atau pembuatan kebijakan berikutnya bila ada kebijakan yang terkait.

3. Pengambilan Kebijakan

Pengambilan sebuah kebijakan yang diputuskan oleh seorang pemimpin akan menjadi dasar bagi bawahannya dalam melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Pembuatan sebuah kebijakan bertujuan untuk memajukan organisasi yang dipimpin dan juga menjadi acuan pengambilan atau pembuatan kebijakan berikutnya bila ada kebijakan yang terkait. Dalam pengambilan sebuah kebijakan, pemimpin visioner selalu mengedepankan visi yang akan menjadi tujuan organisasi dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan agar dapat menjadi acuan organisasi dalam melakukan sebuah tindakan. Kebijakan biasanya akan dikeluarkan saat ada persoalan ataupun masalah, tetapi kebijakan juga bisa dikeluarkan jika suatu bentuk antisipasi suatu permasalahan.

Dalam pengambilan sebuah kebijakan, pemimpin visioner selalu mengedepankan visi yang akan menjadi tujuan organisasi dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi acuan organisasi dalam melakukan sebuah tindakan. Kebijakan biasanya akan muncul saat ada persoalan ataupun masalah, tetapi kebijakan juga bisa dikeluarkan jika suatu persoalan yang dianggap akan menjadi masalah, maka kebijakan dijadikan sebagai antisipasi terlebih dahulu. Kebutuhan masyarakat juga menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan yang akan sangat mempengaruhi hasil atau keputusan akhir kebijakan. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh desa juga sudah melalui tahapan atau proses yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melalui Musyawarah Desa agar pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengambilan kebijakan di Desa Sidomulyo akan mempertimbangkan dan disosialisasikan dengan masyarakat terlebih dahulu agar peraturan yang dikeluarkan tidak menjadi masalah. Peraturan baik Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pembangunan dalam membantu masyarakat sehingga menjadikan Desa Sidomulyo lebih baik. Berikut adalah Peraturan Desa yang disahkan tahun 2021-2022:

Tabel 1. Peraturan di Desa yang Dikeluarkan Tahun 2021

Jenis Peraturan	No	Perihal	Tanggal Penetapan
Peraturan Desa	1	Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020	05 Januari 2021
Peraturan Desa	2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021	14 Januari 2021
Peraturan Desa	3	Rencana Aksi Desa Damai	19 Februari 2021
Peraturan Desa	4	Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021	25 November 2021
Peraturan Desa	5	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022	27 November 2021
Peraturan Desa	6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022	31 Desember 2021

Jenis Peraturan	No	Perihal	Tanggal Penetapan
Peraturan Kepala Desa	1	Ketidaktersediaan Bantuan Tunai Langsung Dana Desa Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2020	05 Januari 2021
Peraturan Kepala Desa	2	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021	15 Januari 2021
Peraturan Kepala Desa	3	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021	14 Januari 2021
Peraturan Kepala Desa	4	Penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021	14 Maret 2021
Peraturan Kepala Desa	5	Penetapan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021	31 Mei 2021
Peraturan Kepala Desa	6	Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021	24 Agustus 2021
Peraturan Kepala Desa	7	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021	15 September 2021
Peraturan Kepala Desa	8	Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021	25 November 2021
Peraturan Kepala Desa	9	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022	31 Desember 2021

Sumber: Data Primer Desa Tahun 2022

Tabel 2. Peraturan Desa yang Dikeluarkan Tahun 2022

Jenis Peraturan	No	Perihal	Tanggal Penetapan
Peraturan Desa	1	Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021	05 Januari 2022
Peraturan Desa	2	Pendirian Badan Usaha Milik Desa	10 April 2022
Peraturan Desa	3	Tambahan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	20 Juli 2022
Peraturan Desa	4	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022	01 November 2022
Peraturan Desa	5	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	29 November 2022
Peraturan Kepala Desa	1	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022	07 Januari 2022
Peraturan Kepala Desa	2	Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa	10 April 2022
Peraturan Kepala Desa	3	Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022	03 Agustus 2022
Peraturan Kepala Desa	4	Penetapan Perubahan Kedua Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022	06 Desember 2022

Sumber: Data Primer Desa Tahun 2022

Dalam pengambilan kebijakan bapak Kepala Desa juga akan mempertimbangan banyak aspek, di antaranya adalah apakah kebijakan yang diambil akan berdampak baik atau buruk bagi masyarakat serta apakah kebijakan tersebut dibutuhkan atau tidak. Kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya menjadi sesuatu yang dibutuhkan, tetapi juga akan menjadi pedoman desa dalam melaksanakan roda pemerintahan di Desa Sidomulyo. Agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan suatu masalah, maka dalam pengambilan sebuah kebijakan perlu adanya pengkajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum disahkan, pengkajian ini dimaksudkan untuk menentukan dan menilai sebuah kebijakan yang akan diambil, karena kebijakan yang dikeluarkan pasti akan berpengaruh bagi masyarakat banyak. Penetapan kebijakan di desa, baik untuk diberlakukan atau tidak diberlakukan harus selalu melalui prosedur dan tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Musyawarah desa menjadi penentu dari setiap kebijakan yang ada di Desa termasuk jika adanya perubahan yang terjadi dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Pengambilan kebijakan di Pemerintahan Desa Sidomulyo dalam beberapa tahun ini sejak dipimpin oleh Bapak Suharto mengalami banyak perubahan signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang selalu ditingkatkan pembangunannya. Agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani bunga, maka infrastruktur sangat dibutuhkan, terutama akses jalan menuju area perkebunan yang selalu dibangun dan diperbaiki setiap tahunnya.

Pengesahan Peraturan yang dilakukan desa pada tahun 2021-2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa dan telah disepakati secara bersama dengan semua elemen masyarakat, yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, misalnya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya, Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang diberi nama Mulyo Joyo, mengacu pada Peraturan Desa tersebut untuk membantu masyarakat desa dan Pemerintahan Desa dalam mengelola kekayaan dan hasil alam yang ada di Desa Sidomulyo. Selain itu, desa juga selalu memfasilitasi masyarakat dalam membantu penjualan maupun pemasaran produk, salah satunya dengan membantu promosi hasil perkebunan masyarakat melalui media sosial maupun media massa dan TV nasional.

4. Pembangunan Desa dan Keterlibatan Masyarakat

Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo memiliki tujuan untuk memajukan desa secara keseluruhan, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam proses ataupun pengerjaannya. keterlibatan masyarakat dalam suatu proses perencanaan pembangunan sangat penting, karena masyarakat dapat mengajukan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa, RT atau RW. Aspirasi tersebut kemudian akan ditampung, serta akan dimusyawarahkan sebelum diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah proses perencanaan akan masuk proses pembangunan, masyarakat juga dapat membantu mengawasi proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam proses pembangunan masyarakat juga dapat melaporkan jika terjadi permasalahan atau penyimpangan saat pengerjaan pembangunan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam keterlibatan masyarakat ini, Pemerintah Desa berperan sebagai wadah yang mengayomi masyarakat dan sebagai lembaga yang akan memberikan dukungan dan masyarakat juga sebagai pendukung visi desa.

Partisipasi masyarakat di Desa Sidomulyo sangat memudahkan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan dan penetapan suatu program, karena akan selalu mendapatkan

masuk dan dukungan dari semua elemen masyarakat. Desa Sidomulyo memiliki cita-cita untuk terus menjadi Desa Mandiri dan terus menjadi desa dengan Indeks Desa Membangun tertinggi ke empat di Indonesia serta Pemerintahan Desa terus berupaya meningkatkan pembangunan setiap tahunnya. Dasar kriteria desa mandiri menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pelayanan, penggunaan anggaran, dan pembangunan. Kriteria ini juga menjadi acuan desa dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang diterapkan. Dari sistem atau cara yang digunakan oleh Pemerintahan Desa Sidomulyo untuk menuju desa mandiri dengan terus mengalami perkembangan karena sistem pelayanan yang sudah baik, penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan sistem pembangunan partisipatif agar semua warga dapat mengajukan aspirasinya secara langsung serta dapat mengawasi sistem pemerintah yang sedang dijalankan oleh desa.



Gambar 4. Pembangunan dan Pelebaran Jalan Ganjaran

Sumber: Data Primer Desa Sidomulyo Tahun 2022

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sidomulyo mulai dari sistem perencanaan sampai ke pengerjaannya adalah dengan menerapkan sistem pembangunan partisipatif yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam pembangunan desa, membuat masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan karena itu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo akan tepat hal dilihat dari data Indeks Desa Membangun yang menjadi terbaik keempat di Indonesia pada tahun 2022. Pembangunan desa melalui sistem perencanaan partisipatif akan memberikan banyak informasi bagi desa dalam membantu kesejahteraan masyarakat Desa Sidomulyo. Konsep pembangunan partisipatif yaitu masyarakat selalu dilibatkan, karena aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan, menjadikan pembangunan akan lebih efektif dan tepat sasaran karena masyarakat terlibat secara langsung serta akan masyarakat selalu memberikan masukan, masukan ini akan membuat desa lebih berkembang pesat, karena pembangunan yang dilakukan desa sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan dalam Musyawarah Desa masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui Ketua RT atau RW maupun Kepala Dusun di setiap wilayahnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa, seperti pembangunan fasilitas umum, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi hasil perkebunannya. Keterlibatan masyarakat pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya memudahkan Pemerintah Desa dalam melakukan diskusi dengan masyarakat terkait pelebaran jalan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena komunikasi yang baik juga masyarakat dengan sukarela

menghibahkan tanahnya yang akan digunakan untuk pelebaran jalan dalam usaha untuk memudahkan dan melancarkan transportasi penjualan maupun pembelian yang akan dilakukan. Hasil observasi di lapangan dari hasil penelitian bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung visi desa untuk memajukan desa melalui pembangunan fisik dan non fisik sangat tinggi, dengan dukungan tersebut pemerintah desa akan melakukan pembangunan yang efektif karena masyarakat akan sangat membantu baik dukungan berupa bantuan hibah tanah maupun tenaga.

Selain itu keterlibatan masyarakat juga memberikan dorongan tersendiri bagi desa, karena jika masyarakat mau terlibat dalam melaksanakan visi desa berarti antusias masyarakat dalam mendukung pemerintahan desa sangat baik dan masyarakat juga percaya kepada pemerintahan desa yang dipimpin oleh Bapak Suharto, kepercayaan masyarakat ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang hadir dalam acara musyawarah desa maupun acara rapat yang diselenggarakan oleh desa pada setiap kegiatan yang akan berhubungan dengan masyarakat. Rapat pada desa akan sangat penting untuk menjalin koordinasi dengan semua pihak, lembaga-lembaga yang ada di desa dan ketua RT atau RW juga selalu dilibatkan dengan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa. Peran penting keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa membantu mensukseskan visi desa yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Selain itu, untuk memajukan desa, masyarakat juga harus selalu bekerja sama dan bergotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan di desa, seperti pembangunan jalan, drainase, dan pembangunan tempat ibadah.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di desa, karena desa merupakan ujung tombak dari suatu negara, oleh karena itu diharapkan Pemerintah Desa disitu hadir dan terjun langsung untuk mensejahterakan masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat juga akan erat berkaitan dengan generasi anak muda di dalam desa, sehingga anak muda harus dibina dan diarahkan ke suatu hal yang positif. Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat oleh karena Pemerintah Desa terjun langsung untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat juga akan erat berkaitan dengan generasi anak muda di dalam desa, sehingga anak muda harus dibina dan diarahkan ke suatu hal yang positif.

Pemberdayaan juga akan selalu didorong oleh Pemerintah Desa untuk menumbuhkan dan membuat masyarakat menjadi lebih baik dalam segala sesuatu yang sangat berpengaruh bagi masyarakat karena pemberdayaan masyarakat merupakan satu hal yang penting, pemberdayaan masyarakat juga akan membuat masyarakat merasa dibantu dan perhatian oleh Pemerintah Desa. Pemberdayaan masyarakat juga terbagi menurut usia warga, karena setiap warga mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua memiliki cara pemberdayaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, desa selalu memberikan pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan mendorong tingkat kebahagiaan masyarakat di desa, sehingga tingkat tekanan masyarakat akan menurun dan tingkat semangat hidup masyarakat terus meningkat dalam bekerja dan berusaha. Secara umum, pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat Desa Sidomulyo adalah pemberdayaan kepada anak-anak maupun ibu-ibu, pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencegah *stunting* pada anak menjadi prioritas desa saat ini. Pembinaan pemuda-pemudi mulai sejak usia dini menjadi fokus pemberdayaan

desa, dengan pembinaan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedepannya.

Pembinaan pemuda-pemudi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Organisasi yang menjadi wadah pemuda-pemudi, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat dan Karang Taruna yang menjadi wadah untuk pemuda ataupun remaja di desa belajar dan berkembang, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia pemuda agar dapat bersaing secara luas saat usia mereka sudah matang. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomulyo juga sering dilakukan kepada kelompok tani, khususnya petani bunga agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan ataupun bantuan hal ini yang berfungsi untuk melatih petani dan memberikan alat-alat yang dapat membantu petani dalam kelompoknya untuk terus berkembang dan maju. Pemberdayaan kepada ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu PKK yang ada di Desa Sidomulyo sangat sering dilakukan untuk memberikan pelatihan yang dapat membantu ibu rumah tangga agar memiliki penghasilan yang dapat membantu perekonomian keluarga dan juga pelatihan bertujuan untuk membimbing ibu-ibu dalam mencari potensi desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting juga dalam menyukseskan program pemberdayaan yang direncanakan oleh desa setiap tahunnya, karena tanpa ada partisipasi dan dukungan program yang diselenggarakan tidak akan berjalan dengan lancar serta tidak akan sukses. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemberdayaan anak meningkatkan pengetahuan yang berguna dan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah seperti pelatihan pengendalian hama pada bunga.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomulyo juga sering dilakukan kepada kelompok tani, khususnya petani bunga agar dapat meningkatkan pendapatan petani bunga. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan ataupun bantuan hal ini yang berfungsi untuk melatih petani dan memberikan alat-alat yang dapat membantu petani dalam kelompoknya untuk terus berkembang dan maju. Pemberdayaan kepada ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu PKK yang ada di Desa Sidomulyo sangat sering dilakukan untuk memberikan pelatihan yang dapat membantu ibu rumah tangga agar memiliki penghasilan yang dapat membantu perekonomian keluarga dan juga pelatihan bertujuan untuk membimbing ibu-ibu dalam mencari potensi desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Keterlibatan ibu-ibu yang menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan dan ujung kelompok yang berperang sangat tinggi dalam rumah tangga sebagai pengelola mulai dari keuangan hingga mendidik anak. Maka dari itu, program pemberdayaan yang dilakukan lebih difokuskan kepada Ibu Rumah Tangga atau Ibu PKK yang ada di Desa Sidomulyo. Pemilihan Ibu-ibu sebagai orang yang berperan penting dalam mendidik anak juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari seorang anak secara tidak langsung jika pembangunan sumber daya manusia dari orang tua sudah memadai, maka proses pendidikan akan ada mengalami kemajuan.

Selain itu kesuksesan ibu-ibu dalam mendidik anak sejak usia dini ataupun mulai dari mengandung sampai melahirkan, bayi yang sehat serta tidak kekurangan dalam gizi dan kesehatannya baik, oleh karena faktor dasar dari anak sudah dipenuhi, maka cara mendidik anak yang baik akan menentukan keberhasilan anak itu juga anak membuat kemajuan di Desa Sidomulyo karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan kemajuan global. Pengupayaan pendidikan anak usia dimulai dari rumah yang dilakukan oleh seorang ibu, menjadikan ibu berperan sangat penting dalam

menciptakan sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, pemberian peran ibu-ibu sebagai penerima program pemberdayaan di Desa Sidomulyo sangatlah tepat.



Gambar 5. Pelatihan Membatik

Sumber: Data Primer Desa Sidomulyo Tahun 2022

Pelatihan diberikan untuk membantu ibu-ibu mencari peluang usaha, yang dapat meningkatkan perekonomian dan untuk merencanakan masa depan desa secara perlahan. Melalui Pelatihan juga diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan ibu-ibu tentang jajan tradisional yang nilai jual serta nilai budaya yang sangat tinggi. Setelah pelatihan ibu-ibu juga diharapkan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang didapat agar membantu perekonomian keluarga. Keterlibatan ibu-ibu yang menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan dan ujung kelompok yang berperang sangat tinggi dalam rumah tangga sebagai pengelola mulai dari keuangan hingga mendidik anak. Maka dari itu, program pemberdayaan yang dilakukan lebih difokuskan kepada Ibu Rumah Tangga atau Ibu PKK yang ada di Desa Sidomulyo. Pemilihan Ibu-ibu sebagai orang yang berperan penting dalam mendidik anak juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari seorang anak secara tidak langsung jika pembangunan sumber daya manusia dari orang tua sudah memadai, maka proses pendidikan akan ada mengalami kemajuan.

V. Kesimpulan dan Saran

Penerapan Kepemimpinan Visioner Dalam Pengambilan Kebijakan di Desa Sidomulyo sudah berjalan dengan baik dan lancar serta mampu membawa perkembangan desa sesuai visi masa depan yang ada dalam kepemimpinan visioner. Pengambilan kebijakan yang berorientasi pada masa depan desa sudah dipikirkan secara menyeluruh dan sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam implementasi visi desa sesuai dengan target pembangunan yang dilakukan salah satu kerja nyata pemerintah desa adalah pembangunan Mall Bunga. Faktor yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan yaitu kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam penetapan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo. Penetapan visi desa oleh Kepala Desa dengan melaksanakan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan sebuah kebijakan, menjadi faktor kesuksesan Desa Sidomulyo dalam mencapai visi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, I., Imron, A., Juharyanto. 2019. *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Karakter Peserta Didik*. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan (Online) 5 (2): 32-39, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ISSN2615-8574>, diakses 9 November 2022.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Danim, Sudarwan, Suparno. 2012. *Menjadi Pemimpin Besar Visioner Berkarakter*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Erie, Hidayat, 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Visioner dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja*. Jurnal : Tourism and Hospitality Essentials Journal (Online) 8 (2): 139-146, <https://ejournal.upi.edu/index.php/thejournal/13747/7984>, Diakses 21 Januari 2023.
- Edi, Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Ilmar Aminuddin. 2020. *Memahami Kebijakan Pemerintah dalam menangani covid-19*. Makassar. Phinatama Media.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Marno, Ali, Triyo 2007. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung. Refika Aditama.
- Setyawan, Dody. 2017. *Kebijakan Publik*. Malang. Intelegensia Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suwanto. 2019. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam organisasi publik dan bisnis*. Jakarta. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wijaya, Agus, dkk. 2015. *Kepemimpinan Berkarakter*. Sidoarjo. Brilian Internasional.
- Wijono, Sutarto. 2018. *Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi*. Jakarta. Prenada Media Group